

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								51,311,637,454	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								555,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %		205,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	0 Dokumen 4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45,884,413,019	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	409 Orang 0 Orang/ Bulan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,779,413,019	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64 Orang 0 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	1 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	3 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	0 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	0 Laporan 12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								540,200,000	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan Hukum Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah Jumlah tanda kepemilikan tanah Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas) Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	10 Unit 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit/Set 1 Unit/Set 10 Unit	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	1 Dokumen 0 Laporan 15 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,200,000	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah perangkat daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								450,000,000	
3	28	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang 0 Orang	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	28	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	0 Orang 10 Kali	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	10 Kali	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								898,778,646	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket 1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 Buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,720,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	417,058,646	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								613,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	1 Unit	Terlaksananya ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	163,800,000	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah mebel	5 Unit	Terlaksananya ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,195,264,954	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 (satu) tahun	3600 Surat	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	120 Mbps 0 Laporan 16 Rekening 14508 Meter Kubik 230400 Kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	328,379,786	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	20 Orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	846,885,168	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,174,180,835	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	53 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	569,180,835	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	405,000,000	
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								4,416,279,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								500,000,000	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Lindung (KPHP/ L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok Panjang Batas Kawasan Hutan yang Dipelihara	3 Unit 30 Km	Tersedianya dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 KPH 10 KPH 0 Unit	Tersedianya dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								105,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	12 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								740,000,000	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	1 Dokumen 5 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	1 Dokumen 7 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi Jumlah izin usaha /kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan dan dikendalikan	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Izin usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan	0 Dokumen 7 Dokumen 7 Izin usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Produksi yang dinilai	5 Dokumen 5 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Lindung yang dinilai	7 Dokumen 7 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah KPH yang melaksanakan pemanfaatan hutan Jumlah promosi tentang pemanfaatan hutan di wilayah KPH	10 KPH 10 KPH	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	20 Unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	10 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								1,466,961,000	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	600 Ha 0 Ha	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,071,961,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N - 5 Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	1 Dokumen 0 Laporan 10 Kali	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								1,239,318,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	2 Kasus 10 Kali 100 Kali 450 Orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	439,318,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Kali 0 Dokumen	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 Kali 150 Orang 100 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	770,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								265,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Komoditi yang Dikembangkan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	10 Jenis 0 Unit Managemen 100 Ha	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,000,000	
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin pengolahan hasil hutan bukan kayu yang diawasi secara berkala Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	10 Izin 0 Unit Managemen 3 Unit Managemen	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun yang dilaksanakan	0 Dokumen 40 Dokumen 10 Kali	Terlaksananya pengawasan produksi hasil hutan kayu yang dihasilkan	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								400,000,000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								400,000,000	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi ekosistem	10 Kali 0 Orang 10 Kelompok	Terlaksananya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	10 lokasi	Jumlah kawasan konservasi ekosistem yang difasilitasi Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dikelola Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Lokasi 10 Kali 0 Ha	Terlaksananya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								3,275,775,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								3,275,775,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Penas Tani	10 Kali 500 Orang 200 Orang 0 Orang 10 Unit 1 Kegiatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,395,890,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kali 10 Kelompok 0 Kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,210,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	3000 Stup 20 Unit 0 Ha 50000 Ha	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	10 KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,591,675,000	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								750,000,000	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								750,000,000	
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan baik	1 DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS Jumlah kegiatan optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang dilakukan Jumlah Petak Ukur Permanen yang ter re-enumerasi dan publikasi Jumlah Unit Bangunan Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS yang Dibangun Monev implementasi REDD + dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun	2 Dokumen 10 Kali 20 Petak 5 Unit 10 KPH	Terlaksananya pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan baik	1 DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah kegiatan pengelolaan DAS yang dilakukan	10 Kali	Terlaksananya pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan baik	1 DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga 0 Lembaga	Terlaksananya pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan baik	1 DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	10 Kali	Terlaksananya pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan baik	1 DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													60,153,691,454	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								214,167,600	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,600,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Set 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 buah 0 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117,087,600	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 mbps 0 Laporan 1 rekening 1 meter kubik 1 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,434,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Laporan 2 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,653,600	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit perbenihan yang dikembangkanyang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 0 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,670,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								1,420,000,000	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Arboretum untuk pelestarian sumber daya genetik Jumlah Kebuin Bibit Rakyat (KBR) yang terbangun Jumlah unit perbenihan yang dikembangkan	2 unit 3 unit 1 unit	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,420,000,000	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan								250,000,000	
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi Jumlah pengada atau pengedar benih atau bibit terdaftar	0 Unit Usaha 1 bibit	Terlaksananya pengawasan benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	10 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sertifikasi sumber benih	2 sertifikat	Terlaksananya pengawasan benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	10 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sertifikasi mutu benih	10 sertifikat	Terlaksananya pengawasan benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	10 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sertifikasi mutu bibit	20 sertifikat	Terlaksananya pengawasan benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	10 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran benih dan / atau bibit yang dilakukan	10 kali	Terlaksananya pengawasan benih/bibit tanaman hutan yang diedarkan	10 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													1,884,167,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								440,022,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	0 Laporan 12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 Buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	1 Unit	Terlaksananya ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176,542,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	0 Mbps 0 Laporan 0 Rekening 0 Meter Kubik 0 KWh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,180,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Laporan 0 Orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,362,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,095,640,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	12 Dokumen 0 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								190,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	0 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	0 Dokumen 10 Izin Usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	0 Dokumen 10 Izin Usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	2 Unit 10 Unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								517,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Hektar 0 Ha	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	517,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								293,640,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah Satgas LMPHBN	10 Kali 10 Kali 60 Orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,640,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Kali 0 Dokumen	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 Kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	50 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,168,589,828	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,168,589,828	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 Unit 1 Unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	1 Kali	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	300 Stup 2 Unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	918,589,828	
TOTAL													2,704,252,353	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								318,762,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	12 dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Unit 1 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Set 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	10 Buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								175,282,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	10 mbps 0 Laporan 1 rekening 1 Meter Kubik 1 Kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,420,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	4 Orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,862,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								710,580,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								170,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	1 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 Izin Usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 Izin Usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	2 Unit 1 Unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								210,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Hektar 0 Ha	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								235,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	10 Kali 10 Kali 45 Orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,580,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 Kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	50 Ha	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,285,512,631	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,285,512,631	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 Kali 10 Orang 1 Unit 1 Unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	1 Kali 1 Kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	300 Stup 2 Unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	805,512,631	
TOTAL													2,314,855,156	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								318,990,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Set 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Buah 0 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %		3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								175,510,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	0 Mbps 0 Laporan 0 Rekening 0 Meter Kubik 0 KWh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,148,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	0 Laporan 0 Orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,362,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	0 Unit 1 Unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,289,100,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								40,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	12 Dokumen 12 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung							150,000,000		
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	0 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen 1 Izin Usaha/Kerjasama	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	2 Unit 1 Unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							812,500,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Hektar 0 Ha	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	812,500,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								236,600,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10 Kali 10 Kali 50 Orang 0 Ha	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH		171,600,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Kali 0 Dokumen	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 Kali 0 Laporan 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH		50,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	0 Unit Managemen 50 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,266,592,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,266,592,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	0 Kali 0 Orang 0 Orang 0 Unit 0 Unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kali 1 Kelompok 0 Kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	0 Kelompok 300 Stup 2 Unit 0 Ha 0 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,036,592,000	
TOTAL													2,874,682,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								548,664,925	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								70,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,000,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honorinya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380,184,925	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 mbps 1 rekening 1 meter kubik 1 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,930,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,254,925	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,498,970,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								200,000,000	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	7 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								896,250,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	1 Hektar	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	896,250,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								357,720,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah satgas LMPHBN Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20 kali 80 orang 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,720,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	10 kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								2,197,508,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								2,197,508,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 1 orang 1 orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	1 kali 1 kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 stup 2 unit 1 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,967,508,000	
TOTAL													4,245,142,925	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								340,206,457	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	0 Laporan 12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								196,726,457	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 mbps 1 rekening 1 meter kubik 1 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,279,600	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,446,857	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								914,580,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 unit	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								150,000,000	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	7 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								464,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab (P0) Luas Hutan Rakyat yang dipelihara (P1 dan P2)	25 Hektar 130 Ha	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	464,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								255,580,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10 kali 10 Kali 45 orang 0 Ha	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 kali 0 Dokumen	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	10 kali 0 Laporan 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,183,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,183,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 20 orang 6 orang 6 Orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 kali 1 kelompok 0 Kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 stup 2 unit 0 Ha 500 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	953,000,000	
TOTAL													2,437,786,457	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							315,542,525		
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							40,000,000		
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15,000,000		
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	1 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10,000,000		
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honor nya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							33,480,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172,062,525	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 mbps 1 rekening 1 meter kubik 1 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,862,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								900,400,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								150,000,000	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha di kawasan Hutan Lindung yang tersedia	7 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							408,800,000		
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	1 Hektar	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	408,800,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							246,600,000		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	20 kali 10 Kali 50 orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181,600,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	10 kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	22 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							50,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	1 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,523,050,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,523,050,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 1 orang 1 orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	1 kali 1 kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 stup 2 unit 1 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,293,050,000	
TOTAL													2,738,992,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								421,382,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	0 Laporan 12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 Jenis	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Pagar)	1 unit	Terlaksananya ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								167,902,525	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 mbps 480 meter kubik 5992.357333 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,728,536	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Instruktur Kesehatan Jasmani/Infrastruktur Senam Jasa Kebersihan Kantor Jasa Pengamanan Kantor Jasa Sopir Kantor	12 kegiatan 13 Bulan 13 Bulan 13 Bulan	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,173,989	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor UPTD KPHL Hulu Batanghari/Resort yang dipelihara	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								462,520,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								40,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								170,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	1 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 KPH	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 KPH	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								202,520,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	15 kali 10 Kali 30 orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,520,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 kali 1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	15 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	5 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,098,346,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,098,346,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 8 orang 7 orang 4 Orang 1 Kali 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	18 kali 2 kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 stup 2 unit 3000 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	868,346,000	
TOTAL													1,982,248,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								314,506,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	0 Laporan 12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	30 set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								161,026,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	120 mbps 16 rekening 14058 meter kubik 230400 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,164,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	3 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,862,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								495,580,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								40,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	0 Dokumen 5 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	2 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	0 1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								255,580,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	10 kali 10 Kali 450 orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,580,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	5 kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	15 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	0 Unit Managemen 1 Unit Managemen 2 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,311,390,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,311,390,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 1 orang 1 orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	10 kali 2 kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek/Diklat pengelolaan Perhutanan Sosial Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah UPPK yang dibangun dan dipelihara Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	10 kali 4 unit 1 kali 1 Unit 9500 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,081,390,000	
TOTAL													2,121,476,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								343,550,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	1 Dokumen 1 Orang	Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200,070,525	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 Mbps 1 Rekening 1 meter kubik 1 kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,208,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138,862,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	1 unit	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								1,415,580,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								45,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	12 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								220,000,000	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	5 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	1 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan	1 unit 1 unit	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								830,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab	1 Hektar	Terlaksananya rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	830,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								270,580,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan Jumlah satgas LMPHBN	10 kali 10 Kali 45 orang	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,580,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	10 kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	22 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	1 Hektar	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,227,400,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,227,400,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 1 orang 1 orang 0 Orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	1 kali 1 kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 stup 2 unit 1 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	997,400,000	
TOTAL													2,986,530,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								350,954,525	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								70,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								30,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	12 Dokumen	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 unit	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Set	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 buah	Terlaksananya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,480,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172,474,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1 mbps 1 Rekening 1 Meter Kubik 1 Kwh	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,612,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,862,525	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45,000,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Kantor Dinas, Rumah Dinas, Kantor UPTD, Kantor Resort)	0 Unit 4500 M3/TAHUN	Terlaksananya barang milik daerah yang ber kondisi baik	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								335,000,000	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								55,000,000	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								40,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah usaha yang tersedia	1 Dokumen	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan	0 Dokumen 1 izin usaha	Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1 Unit	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								190,000,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilakukan Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan	20 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	10 kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitas pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan	22 kali 10 Kali	Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								50,000,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan	1 Ha	Terlaksananya pengawasan lokasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								1,091,140,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								1,091,140,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	1 kali 1 orang 1 orang 1 unit 1 unit	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	1 kali 1 Kelompok	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	300 Stup 2 unit 1 Hektar	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat	1 KPH	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	861,140,000	
TOTAL													1,777,094,525	